

STUDI KEBIJAKAN TENTANG PERAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM AGENDA NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

POLICY STUDY OF THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS ROLES ON INDONESIA'S POVERTY ALLEVIATION AGENDA

B. Mujiyadi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur.
E-mail: bmujiyadi@yahoo.co.id

Diterima: 30 Januari 2013, Disetujui: 17 April 2013

ABSTRACT

Poverty alleviation is Government in cooperation with all of segments in community compulsory. In terms of duty that become Government compulsory, has become tasks of several Ministries/institutions. However, the result of varies activities have not gained good result. The population of poor people are still high, and those people still face varies of poverty problem. Ministry of Social Affairs has strategic role that concentrated in social security and social empowerment. On behalf to gain an optimal result, so integrated approach seen as necessary, both internaly and externaly. The writer recommend to policy maker in Ministry of Social Affairs to set up a kind of policy that concentrate to social protection and social empowerment which on sinergism with other Ministries/instituon that coordinated by Natonal Team on Acceleration of Poverty Eradication TNP2K). One among policy alternative is poverty eradication in less developed municipality. In terms of overcoming the poorest, Ministry of Social Affairs should build up a policy and program that reflects Act no 13 Year 2011 on Overcoming Poverty that have already supported by Government Legacy no 39 Year 2012 on Social Welfare Delivery.

Keywords: *Social security, social empowerment, sinergism.*

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Khusus untuk yang ditangani Pemerintah, terdapat berbagai Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan. Namun demikian, dirasakan bahwa hingga saat ini, hasilnya belum optimal. Populasi penyandang kemiskinan masih amat besar dan mempunyai berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinannya. Kementerian Sosial mempunyai peran strategis yang berkonsentrasi pada kluster perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan. Dalam rangka mencapai hasil optimal, maka perlu adanya sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan dimaksud, baik secara internal di Kementerian Sosial maupun secara eksternal dengan kementerian/lembaga lain. Untuk itu direkomendasikan adanya kebijakan pimpinan Kementerian Sosial untuk berkonsentrasi pada bidang perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan dimaksud, dengan tetap menjaga sinergitas dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga lain yang terkoordinasikan dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Salah satu alternatif kebijakan adalah penanggulangan kemiskinan terpadu di kabupaten tertinggal. Sedangkan khusus untuk penanggulangan fakir miskin, Kementerian Sosial perlu segera menindaklanjuti amanat Undang Undang no 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang sudah didukung Peraturan Pemerintah no 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan dan program yang nyata.

Kata kunci: *Perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, sinergitas.*

penanganan terhadap fakir miskin. Pendekatan utama penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan adalah menggunakan pendekatan KUBE yang di dalamnya disentuh melalui pemberdayaan sosial, ekonomi serta kelembagaan. Namun demikian, pendekatan melalui KUBE an sich dinilai sebagai belum mampu mengatasi masalah secara optimal. Di lain pihak, mulai tahun 2008 secara bertahap seluruh program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh K/L diintegrasikan dalam PNPM. Kemudian berikutnya sejak 2010 penanganan kemiskinan disinergikan dalam program nasional yang dikoordinir oleh TNP2K. Oleh karena itu, studi ini bermaksud mengenali titik lemah penanganan yang dilaksanakan. Atas dasar itu diupayakan untuk menemukan alternatif penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang sinergis dan berdaya guna.

Tujuan yang akan dicapai dari studi kebijakan ini adalah (1) mengevaluasi kebijakan tentang peran Kementerian Sosial dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk evaluasi terhadap tugas dan fungsi Kemensos, jenis peran yang dapat dilakukan dan struktur serta tata kerja. Berbagai aspek yang menjadi perhatian terkait dengan tujuan,

yaitu mengetahui keberhasilan/kegagalan atau kebijakan, mengetahui penyebab kegagalan, mengetahui apakah dampak kebijakan publik sesuai dengan yang diharapkan dan menilai manfaat suatu kebijakan. Kemudian, tujuan (2) menyusun rekomendasi alternatif kebijakan bagi pimpinan Kementerian Sosial dalam rangka proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkenaan dengan peran Kemensos dalam implementasi penanggulangan kemiskinan.

Adapun kebijakan yang dianalisis adalah :

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2010-2014, khususnya tentang penanggulangan kemiskinan.
- b. Permensos Nomor 7a Tahun 2005 tentang Pedoman Pembangunan Kesejahteraan Sosial, khususnya tentang kebijakan dan pogram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.
- c. Rencana Strategis Program Pemberdayaan Fakir Miskin tahun 2010-2014.
- d. Rencana Kerja Pemerintah 2010 yang memuat tentang arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dan TNP2K, yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Posisi Strategis Program Penanganan Kemiskinan Nasional



Sumber: Paparan Kabadiklit di Puslitbang Kesos, Jakarta, 14 Januari 2013.

3. Hasil capaian penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan ke arah meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat, meski perlu penyempurnaan. Secara keseluruhan terjadi pengaruh positif KUBE terhadap kondisi anggota, baik pada variabel material/ekonomi, sosial-psikologis dan spiritual. Namun demikian, perubahan tersebut tidak semata-mata pengaruh dari KUBE, ada kondisi di luar KUBE yang ikut memicu terjadi perubahan tersebut. Pengaruh dari luar ini seperti situasi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang ikut andil memberi peluang kepada KUBE untuk lebih mampu memproduksi dan memasarkan produk KUBE. Demikian juga aparat wilayah setempat yang berkomitmen untuk mengentaskan penyandang kemiskinan ke arah yang lebih mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraannya.
4. Tingkat efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan belum cukup signifikan. Dari sisi efektivitas, sesuai dengan sampel yang ditemui didapatkan bahwa pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE menunjukkan pengaruh yang cukup baik bagi penerima manfaat, meskipun perlu penyempurnaan. Sedangkan dari sisi efisiensi, nominal bantuan stimulasi masih belum berorientasi pada *need assessment* dan *potency assessment* dari para penerima manfaat. Selain itu perlu memperhatikan harga eceran tertinggi setempat.
5. Kondisi KUBE baik secara sosial, ekonomi maupun kelembagaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Secara sosial, KUBE menunjukkan derajat yang relatif baik.
 - b. Secara ekonomi, sebagian KUBE dapat meningkatkan budaya kerja yang mengarah kepada peningkatan pendapatan dan ujungnya kesejahteraan penerima manfaat.
 - c. Secara kelembagaan, KUBE belum

dikelola secara memadai, meski sudah mulai dirintis administrasi dan pengelolaan secara bertahap.

EVALUASI KEBIJAKAN

Peran yang dapat menjadi domain Kemensos dalam proses penanganan kemiskinan melalui penanggulangan kemiskinan mencakup seleksi, registasi, bimbingan motivasi, pendampingan dalam perencanaan usaha dan bimbingan berkala. Dari hasil studi didapatkan informasi bahwa penahapan ini terkesan hanya formalnya saja. Dalam kenyataannya, *needs assessment* dan *potencies assessment* sebagai langkah awal, kurang mendapat perhatian di lapangan. Dengan demikian seleksi yang terlaksana lebih berorientasi pada proses administrasi saja. Pihak yang melakukan proses seleksi di lapangan masih menggunakan model acak. Demikian juga dalam proses penentuan jenis usaha/kerja lebih diserahkan pada pihak Dinas Sosial setempat. Penentuan jenis usaha/kerja ini kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi jenis bantuan yang mungkin kurang *marketable* di wilayah itu. Selain itu, para anggota KUBE kurang terlibat dalam penentuan jenis usaha. Lebih dari itu pendampingan yang dilakukan pun masih belum optimal. Pendamping yang seharusnya melaksanakan bimbingan di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan, belum sepenuhnya melaksanakan peran dimaksud secara optimal.

Pendampingan merupakan titik kritis yang sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, sehingga menjadi isue strategik yang sangat diminati oleh berbagai instansi/ lembaga lainnya. Pada satu sisi, populasi kader yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial memang cukup besar, ini merupakan '*asset*'. Namun demikian asset ini masih perlu ditingkatkan

Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan nuansa pemberdayaan, maka hibah ini menjadi kurang menggigit bagi upaya meningkatkan tanggung jawab sosial bagi penerima manfaat.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah tidak adanya bimbingan lanjut. Para anggota KUBE sebagai penerima manfaat, masih perlu terus diberikan bimbingan baik sosial, ekonomi hingga kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan ketidak mampuan penerima manfaat untuk meningkatkan kemampuannya, dan di lain pihak pendamping yang ada tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk memberi bimbingan lanjut seperti memperluas akses usaha, memperluas akses permodalan serta memperluas jaringan pemasaran.

Adanya kesamaan pola program penanggulangan kemiskinan dengan KUBE, terutama pada level *grass root* yang sama-sama memfasilitasi usaha ekonomi melalui pendekatan kelompok, adanya pendampingan sosial, penyaluran bantuan dana, dan penyuluhan sosial. Pola penanggulangan kemiskinan yang digunakan sama-sama berbasis pada data PPLS yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompotensi untuk melaksanakan dan menetapkan data, yaitu Badan Pusat Statistik. Dengan pendataan yang dilaksanakan oleh para Mantri Statistik di setiap kecamatan, data dihimpun dan diolah sedemikian rupa yang akhirnya menjadi data dasar dan titik pijak bagi setiap lembaga untuk menangani kemiskinan. Target yang diemban oleh berbagai kementerian/ lembaga yang menangani kemiskinan memang bervariasi, dari tingkat *poverty reduction* hingga *poverty eradication*.

TNP2K dengan skema yang memuat 4 klaster, beranjak dari tingkat perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan ekonomi hingga kluster pemberdayaan untuk mengakses sarana perbankan untuk perumahan, kesehatan dan sarana lainnya yang semuanya pada ujungnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga Kementerian Sosial yang beranjak pada klaster perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan diawali dari penerima manfaat kategori fakir miskin (tingkat *grass root*).

Kementerian/Lembaga yang berkiprah di bidang penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan secara kelompok. Tanpa mengabaikan pendekatan individual, para lembaga berupaya memberikan layanan dengan menggunakan cara pendekatan secara kelompok. Untuk kepentingan pendekatan individual, maka peran pendamping sangat diperlukan. Semua program yang dilaksanakan oleh tiap lembaga memberikan dana bantuan/stimulan yang juga diberikan secara kelompok, yang tentu saja pengelolaannya diserahkan kepada penerima manfaat agar menggunakan bantuan dimaksud untuk pengembangan usaha kelompok.

Demikian juga, bahwa setiap pemberian bantuan dana stimulan diiringi dengan adanya bimbingan dan penyuluhan sosial agar pemanfaatannya tidak salah arah. Meskipun demikian, karena keterbatasan kapasitas dan kompetensi para pendamping dan penyuluh, maka seringkali pemanfaatan bantuan stimulan ini menjadi kurang tepat. Adanya perbedaan pola program TNP2K dengan KUBE, terutama berkaitan dengan adanya Badan Kesejahteraan Masyarakat sebagai lembaga mediasi pengguliran modal usaha (kondisi ini sama dengan pola program pemberdayaan fakir miskin melalui LKM-KUBE sejahtera/ BMT KUBE tahun 2003-2005). Sejak tahun 2006 dilaksanakan pola Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS).

kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga yang bergerak di bidang industri dan seterusnya. Setelah penerima manfaat meningkat dari hampir miskin menjadi tidak miskin maka anggota masyarakat dimaksud sudah mampu untuk mengembangkan kerja/usahanya dengan mengakses sistem perekonomian dan perbankan yang ada. Sebagai tambahan informasi, kategori fakir miskin adalah pihak yang penghasilannya hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya 0-25%. Kemudian kategori miskin adalah anggota masyarakat yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya antara 25%-75%. Sementara kategori hampir miskin adalah pihak yang mampu memenuhi kebutuhan dasar antara 75%-125%. Lebih dari angka dimaksud, apabila pihak yang telah berpenghasilan di atas 125% maka sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak miskin

- c. Kementerian Sosial mendapatkan amanat Undang Undang no 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah no 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian Kementerian Sosial dapat lebih berkonsentrasi pada tingkat kemiskinan paling memerlukan penanganan yang lebih memadai, yakni fakir miskin. Untuk itu perlu langkah yang lebih tepat

dengan menetapkan kebijakan dan program yang akurat dan akuntabel.

- d. Dengan pendekatan yang spesifik, maka Kementerian Sosial masih mempunyai prospek untuk menetapkan kebijakan baru, yang lebih mampu menjawab masalah dan tantangan yang ada, baik bersifat preventif maupun represif. Secara teoritis, seperti diungkapkan Edi Suharto (2005) bahwa pemberdayaan yang mungkin dilakukan meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan hingga pemeliharaan. Dengan pendekatan yang spesifik, seperti misalnya konsentrasi pada 50 Kabupaten tertinggal sesuai kontrak kinerja Menteri Sosial dengan Presiden pada saat dilantik maka peran Kemensos akan lebih tampak dan berkiprah dengan baik.

Kriteria Analisis Kuantitatif

Terdapat sejumlah pilar-pilar kesejahteraan sosial menjadi pendamping program penanggulangan kemiskinan. Dari jumlah yang ada, terdapat 43.148 orang TKSM terlatih. Dari tenaga yang ada kiranya mampu untuk menjalankan perannya sebagai pendamping yang melayani populasi RTSM menjadi prioritas Kemensos).

Kondisi tahun 2012, Potensi dan Sumber Daya Sosial yang ada antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut:

Selain potensi dan sumber kesejahteraan yang ada di masyarakat, pada tingkat PNS telah dimiliki sejumlah tenaga yang bekerja pada instansi baik di tingkat pusat, propinsi hingga kabupaten/kota. Untuk tingkat pusat,

pada tahun 2012 ini di Kementerian Sosial tersedia 4.129 PNS yang tersebar di sejumlah unit organisasi. Dari jumlah PNS sebanyak itu, terdapat 947 PNS yang masuk dalam jabatan fungsional yang meliputi:

Tabel 2. Jenis Jabatan Fungsional Dan Jumlahnya

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Pekerja Sosial	502	12	Peneliti	32
2	Widya Iswara	72	13	Litkayasa	33
3	Arsiparis	91	14	Analisis Kepegawaian	1
4	Pranata Komputer	25	15	Pranata Humas	6
5	Auditor	28	16	Perancang Per Undang-undangan	-
6	Perencana	39	17	Statistisi	-
7	Dosen	69	18	Instruktur	-
8	Perawat Umum	2	19	Pustakawan	3
9	Dokter	4	20	Penyuluh Sosial	36
10	Perawat Gigi	1	21	Fisio Terapi	-
11	Dokter Gigi	3			

Sumber: Subbag. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional, Biro Orpeg, 2012.

Secara keseluruhan pegawai Kementerian Sosial Pusat dapat dilihat dalam tabel seperti berikut:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Di Kemensos Berdasarkan Unit Kerja

NO	UKE 1	UKE 2	JUMLAH PEGAWAI
1	Sekretariat Jenderal (489)	1. Biro Perencanaan	51
		2. Biro Keuangan	44
		3. Biro Orpeg	102
		4. Biro Umum	184
		5. Biro Humas	40
		6. Puspensos	32
		7. Pusat Peny Per-UU	36
2	Inspektorat Jenderal	1. Sekretariat Itjen	46
		2. It 1 bd Dayasos	15
		3. It 2 bd Yanrehsos	17
		4. It 3 bd Banjamsos	30
		5. It 4 bd Penunjang	14
3.	Ditjen Daya Sos dan Gulkin	1. Set Ditjen	45
		2. Dit Pemb Keluarga	34
		3. Dit Pemb Kelembagaan	36
		4. Dit Pemb KAT	37
		5. Dit FM	35
		6. Dit K2 Kesos	62

Karang Taruna. Para tenaga ini dapat dioptimalkan sebagai tenaga pendamping yang akan bertugas sebagai pihak terdepan dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu diberikan stimulus sedemikian rupa, seperti pemberian semacam tunjangan operasional, agar mereka mampu meningkatkan kinerjanya.

2. Target group Kemensos adalah PMKS yang termasuk dalam kategori 1 (satu) dan 2 (dua).

Apabila dilihat dalam skema penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dalam TNP2K, maka peran Kementerian Sosial lebih berorientasi pada aspek perlindungan dan jaminan (kategori 1) serta pemberdayaan (kategori 2) dengan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang juga bersama-sama menjalankan perannya untuk penanggulangan kemiskinan.

Pendekatan melalui kelompok (KUBE) dapat dilanjutkan walaupun perlu adanya penyempurnaan dalam beberapa titik. Secara sosial, pendekatan KUBE sudah dapat dikatakan baik, mengingat sentuhan individu, keluarga dan komunitas dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pendamping yang melaksanakan tugas. Hanya saja, untuk ini masih perlu peningkatan kapasitas pendamping, karena para pendamping yang ada terkesan seadanya. Selain itu pelibatan tokoh masyarakat setempat untuk lebih memberikan peluang kepada KUBE untuk mengembangkan usahanya.

Untuk titik sentuhan pendekatan ekonomi, KUBE belum mampu memberikan penguatan yang signifikan. Hal ini bermula dengan tidak didahuluinya bantuan stimulan yang diberikan, dengan semacam studi kelayakan dari potensi dan sumber

pemasaran produknya. Salah satunya adalah besaran nominal bantuan stimulan yang besarnya sama di seluruh Indonesia. Secara administrasi nominal bantuan dimaksud adalah Rp 30.000.000,- tiap kelompok yang beranggotakan 10 orang. Selain itu pendamping yang ada kurang mampu mengantarkan para anggota kelompok ke dalam kegiatan usaha/kerja yang berpotensi pasar. Untuk ini titik sentuhnya adalah pelibatan pendamping dan anggota KUBE dalam studi kelayakan sejak penentuan jenis usaha/kerja, besarnya kebutuhan (bahan dan alat) hingga ketrampilan pemasaran.

Sedangkan untuk kelembagaan, pada setiap KUBE ditentukan harus beranggotakan 10 orang. Struktur organisasi yang ada pun harus ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, yang tentunya harus dilibatkan dalam pengelolaan (*management*) KUBE. Untuk ini, titik sentuh yang dapat dilakukan adalah penguatan kapasitas dalam mengelola usaha/kerja secara kelompok.

3. Kemensos telah memiliki data *by name by address*

Kementerian Sosial telah memiliki data *by name by address* yang didapatkan dari survei PPLS. Dengan menggunakan data ini, maka kemungkinan salah sasaran akan dapat ditekan serendah-rendahnya. Data dimaksud telah diakui secara sah dan digunakan semua pihak yang secara administratif berperan dalam penentuan peta kemiskinan.

4. Pengalaman Kemensos dalam pelaksanaan KUBE

Kementerian Sosial telah melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan KUBE sejak tahun 1980 an.

Pekerjaan Umum, menguatkan sarana jalan dan irigasi. Kemudian seterusnya Kementerian/Lembaga lain menjalankan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk penanganan secara makro ini, kiranya peran TNP2K yang perlu dioptimalkan. Dengan demikian setiap Kementerian/Lembaga masih tetap dalam koordinasi yang diperankan oleh TNP2K ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto, Isbandi. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Departemen Sosial RI. (2004). *Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Potensi Sosial Masyarakat Lokal di Daerah Miskin*, Jakarta: Pusbangtansosmas
- , (2005). *Prioritas Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Enam Propinsi*, Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Sosial
- , (2004). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial - Studi Kasus Rumah tangga sangat miskin di Indonesia*, Jakarta: Kerjasama Puslitbang UKS dengan STKS Bandung
- , (2006). *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin - Tahun Anggaran 2006*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Faturrochman, Marcellus Molo. "Karakteristik Rumah Tangga Miskin". *Populasi*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 1994.
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama.
- , (2006). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan dan Implikasi Pilihan Metode dan Teknik*, Bandung, STKS.
- Hill, Michael, (1996). *Social Policy: Comparative Analysis*, London: Prentice-Hall Wheat Sheaft.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*, Australia, Longman Pty Ltd.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, (2003). *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Sekretariat KPK
- Mkandawire, P. Thandika, (2009). *Social Policy in Development Context*. New York: Palgrave MacMilan.
- Pranarka, A.M.W. & Moeljarto, Vindyandika. (1996). *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, konsep, dan implementasi*, Jakarta: Centre for strategic and intenational studies (CSIS).
- Putra, Fadillah. (2001). *Paradigma kritis dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Surabaya: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya
- Segal, Elizabeth E, and Brzuzy Stephanie, (1998). *Social Welfare Policy, Programs, and Practice*, Itaca, Illinois: F.E Peacock Publishers, Inc.
- Soetrisno, Loekman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius.